



# LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I **2025**

**PENGADILAN  
MILITER UTAMA 663162**

---

JALAN RAYA PENGKILINGAN, CKUNG, JAKARTA TIMUR  
WWW.DILMILTAMA.GO.ID  
ADMIN@DILMILTAMA.GO.ID  
021-48701705



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung  
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, [www.dilmiltama.go.id](http://www.dilmiltama.go.id), [admin@dilmiltama.go.id](mailto:admin@dilmiltama.go.id)

Nomor : 818 /SEK.PMU/KU2.1/VII/2025

Jakarta, 24 Juli 2025

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Hal : Penyampaian Laporan Keuangan  
Semester I Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Tipe A1 Jakarta VI  
Di Jakarta

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-147/PB/2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Pengadilan Militer Utama satuan kerja 663162.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretaris,

  
Nuratiah

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer Utama adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 24 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Militer Utama



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>NERACA .....</b>	<b>x</b>
<b>LAPORAN OPERASIONAL .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>	<b>xiii</b>
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
A.1. Dasar Hukum .....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis .....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	3
A.4. Basis Akuntansi .....	3
A.5. Dasar Pengukuran .....	4
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	4
<b>B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>11</b>
B.1 Pendapatan .....	11
B.2 Belanja Barang .....	14
B.3 Belanja Modal .....	14
B.4 Capaian Output .....	14
<b>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .....</b>	<b>17</b>
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran .....	17
C.2 Persediaan.....	17

C.3 Uang Muka dari KPPN .....	18
C.4 Ekuitas.....	18
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....	19
D.1 Beban Persediaan .....	19
D.2 Beban Barang dan Jasa .....	20
D.3 Beban Perjalanan Dinas .....	20
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	21
E.1 Ekuitas Awal .....	21
E.2 Defisit LO .....	21
E.3 Transaksi Antar Entitas .....	21
E.4 Ekuitas Akhir.....	21
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA .....	22
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	22
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI .....	22
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	22

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan .....</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025 .....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3. Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 .....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 .....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 7. Rincian Persediaan.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 .....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 9. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 .....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 .....</i>	<i>20</i>



## Pengadilan Militer Utama

Jl. Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur

Telp. 021-48701705 Fax. 021-48701705 e-mail : dilmiltama@dilmil.org

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 24 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

# RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara periode 30 Juni TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen.

Realisasi Belanja Negara 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp54.284.315,00 atau mencapai 29,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp185.390.000,00

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp861.000,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp861.000,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp400.000,00 dan Rp461.000,00

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.



Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp54.105.371,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp54.105.371,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp54.105.371,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp282.056,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp54.105.371,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp54.284.315,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp461.000,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER UTAMA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-	-	-	-	-
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang	B.3	185.390.000,00	54.284.315,00	29,28	468.110.000,00	241.135.817,00	51,51
3. Belanja Modal	B.4	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		185.390.000,00	54.284.315,00	29,28	468.110.000,00	241.135.817,00	51,51



# NERACA

PENGADILAN MILITER UTAMA  
NERACA  
PER 30 JUNI 2025 dan 31 DESEMBER 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	400.000	-
Persediaan	C. 2	461.000	282.056
Jumlah Aset Lancar		861.000	282.056
Aset Tetap			
JUMLAH ASET		861.000	282.056
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 3	400.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		400.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		400.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 4	461.000	282.056
JUMLAH EKUITAS		461.000	282.056
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		861.000	282.056

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER UTAMA  
LAPORAN OPERASIONAL  
30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		-	-
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI			
BEBAN PERSEDIAAN	D. 1	1.193.056	444.000
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 2	968.000	12.134.000
BEBAN PEMELIHARAAN			
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 3	51.944.315	228.506.817
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
JUMLAH BEBAN		54.105.371	241.084.817
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(54.105.371)	(241.084.817)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(54.105.371)	(241.084.817)

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER UTAMA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
30 JUNI 2025 dan 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	282.056,00	286.000,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(5.410.537,00)	(241.084.817,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		-	-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	54.284.315,00	241.135.817,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		178.944,00	51.000,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E. 4</b>	<b>461.000,00</b>	<b>337.000,00</b>

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

Dasar  
Hukum

### A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan



Akuntansi Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan
17. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4743/SEK/KU.00/VII/2025 tentang Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2025.

## A.2 PROFIL Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Utama

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis  
Pengadilan  
Militer Utama*

### Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2025 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2025.

### Visi dan Misi Pengadilan Militer Utama

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Militer Utama menetapkan visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”.**

yang bertujuan agar Pengadilan Militer Utama dan Peradilan Militer dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer Utama melakukan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

*Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan*

---

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer Utama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akrua*

### **A.4. Basis Akuntansi**

---

Pengadilan Militer Utama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer Utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Utama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan – LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2) Pendapatan – LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah



yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**Aset Lainnya**

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70
--------------------------------	----

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kebijakan  
Akuntansi  
atas  
Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer Utama telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 (lima) kali dari DIPA awal. Pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	431.916.000	185.390.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	431.916.000	185.390.000

Realisasi

Pendapatan

Rp0,00

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		-	-	0,00
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	0,00

**Belanja***Realisasi**Belanja**Negara**Rp54.284.315,00*

Realisasi Belanja Pengadilan Militer Utama pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp54.284.315,00 atau 29,28 persen dari anggaran belanja sebesar Rp185.390.000,00.

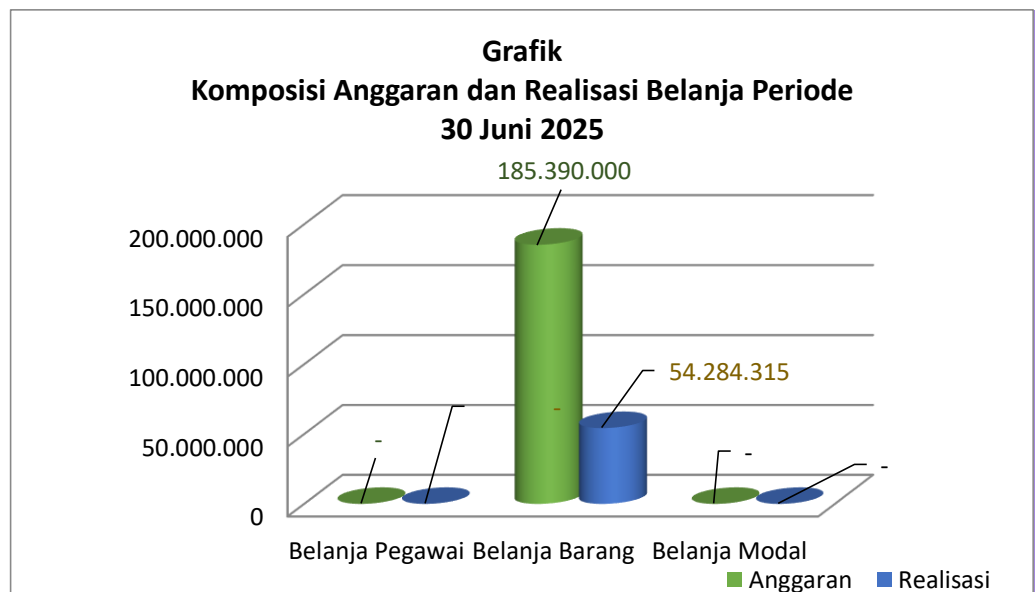
Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025**

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	0,00
52	Belanja Barang	185.390.000,00	54.284.315,00	29,28
53	Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>185.390.000,00</b>	<b>54.284.315,00</b>	<b>29,28</b>
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>185.390.000,00</b>	<b>54.284.315,00</b>	<b>29,28</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan belanja barang bahan dan tidak adanya belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota pada Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	54.284.315,00	241.135.817,00	(186.851.502,00)	(77,49)
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		54.284.315,00	241.135.817,00	(186.851.502,00)	(77,49)



**B.2 Belanja Barang**

Belanja

Barang

Rp54.284.315,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.284.315,00 dan Rp241.135.817,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp186.851.502,00 atau 344,21 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan belanja barang bahan dan tidak adanya belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024***(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	426.000,00	-	426.000,00	100,00
Belanja Bahan	542.000,00	12.134.000,00	(11.592.000,00)	(2.138,75)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.372.000,00	495.000,00	877.000,00	63,92
Belanja Perjalanan Biasa	51.584.315,00	41.327.346,00	10.256.969,00	19,88
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	-	360.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	187.179.471,00	(187.179.471,00)	-
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>54.284.315,00</b>	<b>241.135.817,00</b>	<b>186.851.502,00</b>	<b>344,21</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>54.284.315,00</b>	<b>241.135.817,00</b>	<b>186.851.502,00</b>	<b>344,21</b>

**B.4 Belanja Modal**

Belanja

Modal Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	-	-	-	<b>100,00</b>
<b>Pengembalian</b>	-	-	-	-
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	-	-	-	<b>100,00</b>

#### B.5. Capaian Output Satuan Kerja

Selama periode Semester I Tahun 2025, output satuan kerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA SEMESTER I TAHUN 2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	185,390,000.00	54,284,315.00	29.28%					
04	PERADILAN	185,390,000.00	54,284,315.00	29.28%					
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	185,390,000.00	54,284,315.00	29.28%					
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	185,390,000.00	54,284,315.00	29.28%					
AEA	Koordinasi	109,000,000.00	20,111,950.00	18.45%					
001	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	84,000,000.00	20,111,950.00	23.94%	4.0000	Kegiatan	1.0000	25%	Pembinaan dan Pengawasan ke Dilmil I-06 Banjarmasin
002	Koordinasi PERcepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	25,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Kegiatan	0.0000	0%	Belum ada pelaksanaan koordinasi percepatan penyelesaian perkara
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	17,570,000.00	2,700,000.00	15.37%					
U01	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	4,970,000.00	965,000.00	19.42%	7.0000	Perkara	2.0000	32%	Penyelesaian 2 Perkara Perbedaan Pendapat
U02	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	12,600,000.00	1,735,000.00	13.77%	30.0000	Perkara	4.0000	14.21%	Penyelesaian 4 Perkara Banding
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	58,820,000.00	31,472,365.00	53.51%					
001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	58,820,000.00	31,472,365.00	53.51%	3.0000	Perkara	1.0000	53.51%	Sidang keliling yang dilaksanakan di Dilmilti I Medan

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp400.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 dan Rp0,00.

**Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)			
No.	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	400.000,00	0,00
	Jumlah	400.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Militer Utama per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Uang Tunai	Rp 400.000,00
2	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp -
3	Di rekening	Rp -
	<b>Total</b>	<b>Rp 400.000,00</b>
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	<b><u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u></b>	<b><u>Rp 400.000,00</u></b>

**C.2 Persediaan**

Persediaan  
Rp461.000,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp461.000,00 dan Rp282.056,00,

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Rincian Persediaan**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	282.056,00	178.944,00	461.000,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		282.056,00	178.944,00	461.000,00

### C.3 Uang Muka dari KPPN

Uang muka  
dari KPPN  
Rp400.000,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### C.4 Ekuitas

Ekuitas  
Rp461.000,00

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp461.000,00 dan Rp282.056,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan  
Rp1.193.056,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.193.056,00 dan Rp444.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 8. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.193.056,00	444.000,00	168,71
Total		1.193.056,00	444.000,00	168,71

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan  
Jasa Rp968.000,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp968.000,00 dan Rp12.134.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	426.000,00	0,00	-
2	Beban Bahan	542.000,00	12.134.000,00	(95,53)
Total		968.000,00	12.134.000,00	(92,02)

:



D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp51.944.315,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.944.315,00 dan Rp228.506.817,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	51.584.315,00	41.327.346,00	24,82
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	360.000,00	0,00	-
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	187.179.471,00	-
Total		51.944.315,00	228.506.817,00	(77,27)

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
Rp282.056,00

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp282.056,00 dan Rp286.000,00.

*Defisit LO*  
Rp54.105.371,00

**E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah defisit sebesar Rp54.105.371,00 dan Rp241.084.817,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

*Transaksi Antar Entitas*  
Rp54.284.315,00

**E.3 Transaksi Antar Entitas**

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.284.315,00 dan Rp241.135.817,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	54.284.315,00
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	<b>54.284.315,00</b>

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp54.284.315 ,00.

*Ekuitas Akhir*  
Rp461.000,00

**E.4 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp461.000,00 dan Rp337.000,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Militer Utama yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Militer Utama.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama  
Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer Utama adalah BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JAKARTA JATINEGARA A/C 651556631621000 a.n. BPG175PENGADILAN MILITER UTAMA 663162 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00
2. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/KPMU/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SEK.PMU/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran : Nuratiah, S.H., M.H.
  - b. PPK : Try Susanti, S.E.
  - c. PPSPM : Dwi Mulyanto, S.E., M.M.
  - d. Bendahara Pengeluaran : Noviani Nistria Susanti

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN MILITER UTAMA 663162

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM  
Tgl Cetak : 23/07/25 2:27 PM  
Halaman : 1  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Belanja Negara</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	185,390,000	54,284,315	(131,105,685)	29.28	468,110,000	241,135,817	(226,974,183)	51.51
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	185,390,000	54,284,315	(131,105,685)	29.28	468,110,000	241,135,817	(226,974,183)	51.51
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN MILITER UTAMA 663162

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM  
Tgl Cetak : 23/07/25 2:27 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_salker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	185,390,000	54,284,315	(131,105,685)	29.28	468,110,000	241,135,817	(226,974,183)	51.51
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
Nuratiah, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:27 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	400,000	0	400,000	0.00
Persediaan	461,000	282,056	178,944	63.44
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>861,000</b>	<b>282,056</b>	<b>578,944</b>	<b>205.26</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>861,000</b>	<b>282,056</b>	<b>578,944</b>	<b>205.26</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Uang Muka dari KPPN	400,000	0	400,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	461,000	282,056	178,944	63.44
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>461,000</b>	<b>282,056</b>	<b>178,944</b>	<b>63.44</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>461,000</b>	<b>282,056</b>	<b>178,944</b>	<b>63.44</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>861,000</b>	<b>282,056</b>	<b>578,944</b>	<b>205.26</b>

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda 197109051998032005

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2025  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 24/07/25 1:10 PM  
Tgl Cetak : 24/07/25 3:41 PM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	1,193,056	444,000	749,056	168.706
Beban Barang dan Jasa	968,000	12,134,000	(11,166,000)	(92.022)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	51,944,315	228,506,817	(176,562,502)	(77.268)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 24/07/25 1:10 PM

Tgl Cetak : 24/07/25 3:41 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	54,105,371	241,084,817	(186,979,446)	(77.558)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(54,105,371)	(241,084,817)	186,979,446	(77.558)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(54,105,371)	(241,084,817)	186,979,446	(77.558)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(54,105,371)	(241,084,817)	186,979,446	(77.558)



Keterangan :

FINAL

Jakarta, 24 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Nuratiah, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:27 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(54,105,371)	(241,084,817)	186,979,446	(77.56)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	54,284,315	241,135,817	(186,851,502)	(77.49)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	178,944	51,000	127,944	250.87
EKUITAS AKHIR	461,000	337,000	124,000	36.8


Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

  
Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 05      **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100      **DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA** : 663162      **PENGADILAN MILITER UTAMA**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 23/07/25 2:33 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
Tgl Data : 23/7/25 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,530,000	5,530,000	426,000	0	426,000	7.7	5,104,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,530,000	5,530,000	426,000	0	426,000	7.7	5,104,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	22,846,000	3,955,000	542,000	0	542,000	13.7	3,413,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	22,846,000	3,955,000	542,000	0	542,000	13.7	3,413,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,650,000	6,615,000	1,372,000	0	1,372,000	20.74	5,243,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,650,000	6,615,000	1,372,000	0	1,372,000	20.74	5,243,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	9,600,000	0	0	0	0		0
522191	Belanja Jasa Lainnya	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	10,000,000	400,000	0	0	0	0	400,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167,420,000	167,420,000	51,584,315	0	51,584,315	30.81	115,835,685
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,470,000	1,470,000	360,000	0	360,000	24.49	1,110,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	388,890,000	168,890,000	51,944,315	0	51,944,315	30.76	116,945,685
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	431,916,000	185,390,000	54,284,315	0	54,284,315	29.28	131,105,685
	JUMLAH BELANJA	431,916,000	185,390,000	54,284,315	0	54,284,315	29.28	131,105,685

**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2025  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:28 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	400,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	461,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	400,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	54,284,315
0.0	391111	Ekuitas	0	282,056
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	426,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	542,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	51,584,315	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	360,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,193,056	0
<b>JUMLAH</b>			<b>54,966,371</b>	<b>54,966,371</b>

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.  
 Pembina Utama Muda

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:28 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	54,284,315
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	426,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	542,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,372,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,584,315	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360,000	0
JUMLAH			54,284,315	54,284,315

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiyah, S.H., M.H.

197109051998032005



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM  
Tgl Cetak : 24/07/25 3:59 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	700,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	891,529	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	337,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,591,529
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	241,135,817
0.0	391111	Ekuitas	0	286,000
3.0	521211	Beban Bahan	12,134,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	41,327,346	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	187,179,471	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	444,000	0
JUMLAH			243,013,346	243,013,346

Keterangan :  
FINAL

Jakarta, 24 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
Nuratiah, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 663162 ) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM  
Tgl Cetak : 24/07/25 3:59 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	241,135,817
3.0	521211	Belanja Bahan	12,134,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	495,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,327,346	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	187,179,471	0
JUMLAH			241,135,817	241,135,817

Keterangan :  
FINAL

Jakarta, 24 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
Nuratiah, S.H., M.H.  
197109051998032005

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)**  
**SEMESTER I PERIODE 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (663162) Pengadilan Militer Utama  
 Kode dan Nama UAPPAW : ( ) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara  
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
	<b>Kesesuaian Saldo</b>	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
	<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
	<b>To Do List</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	Ada	Tidak	Seharusnya



1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak

11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruel?		√	Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>

1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) * Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak

7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
<b>TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?			Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
<b>TELAH LK BLU</b>				
	<b>LPSAL BLU</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	<b>LAK BLU</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya



**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan*

Mengetahui

Kasubbag Keuangan dan Pelaporan,



(Dwi Mulyanto, S.E., M.M.)  
NIP. 198109202006041007

Jakarta, 24 Juli 2025

Penelaah,



(Try Susanti, S.E.)

NIP. 199506062020122005

**DAFTAR REKENING BANK BENDAHARA PENGELUARAN  
PENGADILAN MILITER UTAMA  
30 JUNI 2025**

No.	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Atas Nama	Bank / Kantor Pos	Surat Izin		TNP / NON TNP	Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp.)
									Nomor	Tanggal		
1	Pengadilan Militer Utama	005	05	Virtual	651556631621000	BPG175 Pengadilan Militer Utama 663162	Pengadilan Militer Utama	BRI Cabang Jakarta Jatinegara	S-549/PB.3/2021	26-03-2021		Rp -

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nuratiyah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005